

## ABSTRAK

Pakistan adalah salah satu negara di Asia Selatan, serta dibangun berlandaskan Islam. Kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Namun, militer mendominasi untuk mengawasi jalannya sistem pemerintahan di Pakistan. Hal inilah yang menjadikan kondisi Pakistan semakin tidak aman, angka diskriminasi terus bertambah, budaya patriarki yang muncul di tengah-tengah masyarakat Pakistan serta pembunuhan politik yang kerap terjadi. Namun terpilihnya Benazir Bhutto pada tahun 1988 sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Pakistan, berhasil melunturkan budaya patriarki di tengah-tengah masyarakatnya. Melalui pendekatan *women empowerment* akan melihat bagaimana proses Benazir dalam meningkatkan kesadaran perempuan-perempuan di Pakistan agar bisa menyuarakan hak-haknya yang selama ini tidak terdengarkan di pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan masa lalunya membentuk Benazir dalam pembuatan kebijakannya. Sehingga di dalam kepemimpinannya, Benazir ingin mencapai nilai demokrasi di Pakistan dengan berusaha meningkatkan angka partisipasi perempuan di dalam perpolitikan Pakistan. Namun sebelum mencapai nilai demokrasi tersebut, Benazir berusaha menghapuskan angka diskriminasi terhadap perempuan dan juga memperbaiki sistem pendidikan di Pakistan.

**Kata kunci:** *Pakistan, diskriminasi, budaya patriarki, Benazir Bhutto, women empowerment.*

## ABSTRACT

Pakistan is one of the countries in South Asia, and is built based on Islam. The policies that formed must be based on the Qur'an and Hadiths. However, the military dominated to oversee the running of the government system in Pakistan. These was the reason that turned the condition of Pakistan increasingly insecure, the number of discrimination continues to increase, patriarchal culture that arises in the midst of Pakistani society and the frequent political killings. But the election of Benazir Bhutto in 1988 as the first female Prime Minister in Pakistan, succeeded in eliminating patriarchal culture in the midst of her community. Through the women empowerment approach, we will see how Benazir succeed in increasing women's awareness in Pakistan so that they can stand for their rights which have not been heard in the previous government. Benazir formed her policies based on her educational background and past. So that in her leadership, Benazir wanted to achieve democratic values in Pakistan by trying to increase the rate of women's participation in Pakistani politics. But before that, Benazir tried to eliminate the number of discrimination against women and also improve the education system in Pakistan

**Key words:** *Pakistan, discrimination, patriarchal culture, Benazir Bhutto, women empowerment*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pakistan adalah salah satu negara yang ada di Asia Selatan yang lebih dikenal sebagai negara yang lahir atas semangat nasionalisme Islam. Namun dalam hal ini, Pakistan juga dikenal sebagai negara yang kurang stabil dalam perpolitikan. Sejak tahun 1958 negara Pakistan dikuasai oleh militer (Sumairs, 2007). Namun pada masa pemerintahan Zia Ul Haq, kekuasaan militer meningkat tinggi di Pakistan dan hal inilah yang membuat dunia politik di Pakistan semakin keras. Partai politik tidak berjalan efektif dan perempuan tidak diperbolehkan untuk aktif dalam dunia politik. Berawal dari masa itu, kekerasan banyak terjadi dan juga kudeta militer telah menjadi tradisi di Pakistan.

Awal dari kekerasan dan kudeta militer pada masa pemerintahan Zia Ul-Haq yang menjadikan dunia politik di Pakistan menjadi tidak stabil (Ali, Tragedi Benazir Bhutto, 2008, p. 84). Militer banyak memegang kekuasaan di negara Pakistan, yang dibuktikan dengan banyaknya perang antara militer dan sipil yang akhirnya memberikan pengaruh terhadap sejarah politik di Pakistan. Praktek pembunuhan politik di Pakistan lazim terjadi di kalangan politikus dan tidak pernah mendapatkan titik terang mengenai siapa aktor di balik pembunuhan politik di sana. Akan tetapi beberapa dari pemerhati politik memandang bahwa militer dan aparat keamanan di Pakistan yang banyak memegang peran di balik kasus tersebut, namun teroris akan menjadi salah satu aktor untuk dijadikan pengalihan isu tersebut (Weaver, 2008).

Politik yang keras dan pembunuhan politik terhadap politikus di Pakistan membuat keberadaan Benazir Bhutto sebagai politikus perempuan pertama menjadi warna baru dalam politik di Pakistan. Partisipasi perempuan dalam politik serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi tantangan di Pakistan. Namun kenyataannya bentuk-bentuk dari kekerasan dan diskriminasi gender sudah menjadi kebiasaan di Pakistan. Kekerasan tersebut juga banyak terjadi di dalam lingkup politik, baik itu sasarannya terhadap laki-laki maupun perempuan. Namun kekerasan politik di Pakistan selalu dirasakan oleh perempuan, sebab posisi perempuan yang minoritas di kalangan politik. Pembunuhan-pembunuhan politik yang selalu terjadi, selain ayah Benazir Bhutto hingga Benazir Bhutto itu sendiri, tercatat ada beberapa politikus yang menjadi korban dari pembunuhan politik di Pakistan. Salah satunya ialah menteri kesejahteraan sosial yang mana menterinya ialah seorang perempuan, Zille Huma Usman yang dibunuh pada tahun 2007 (Elashi, 2014).

Pakistan adalah salah satu negara yang jumlah partisipasi politik perempuannya masih sedikit. Politik di Pakistan lebih didominasi oleh kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan. Melihat dari posisi tersebut, perempuan dalam keikutsertaan dalam dunia perpolitikan sangat kurang. Pada tahun 1988, kuota untuk perempuan tercatat hanya berjumlah 3% yang ditugaskan di legislatif. Setiap periode kuota untuk perempuan lebih minim dibandingkan kuota untuk laki-laki di dalam kursi pemerintahan (Awan M. A., 2016, pp. 1-2). Data tersebut menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam perpolitikan Pakistan sangat besar. Selain hal tersebut, keterlibatan perempuan memiliki tantangan lain ketika berada dalam dunia politik. Tantangan bagi perempuan

Pakistan yaitu dapat mengurangi angka kekerasan, terutama kekerasan seksual yang terjadi di Pakistan (Indonesia, 2008). Perempuan yang berada dalam dunia politik Pakistan diharapkan dapat memberikan warna baru untuk perempuan-perempuan Pakistan.

Rendahnya partisipasi politik di Pakistan salah satunya disebabkan oleh nilai patriarki yang dianut di negara tersebut. Adanya ketidaksetaraan gender ini membuat kedudukan perempuan di Pakistan dapat melemahkan posisinya dalam bermasyarakat dan juga sangat rentan dengan kekerasan. Banyaknya kekerasan yang dialami oleh perempuan Pakistan karena disebabkan oleh masih lemahnya hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan (Dearden, 2016). Sehingga setiap tahunnya angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Kekerasan yang berbasis gender ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, karena posisi perempuan yang di posisikan sangat rendah dibandingkan laki-laki. Nilai patriarki ini juga banyak disalahgunakan oleh beberapa orang yang mengaitkannya dengan agama, sehingga menjadi kontrol yang sangat kuat untuk membatasi perempuan dalam melakukan aktivitasnya (Tarar & Pulla, 2014, p. 57).

Benazir Bhutto hadir di tengah-tengah kondisi Pakistan yang sangat keras terhadap perempuan. Tidak mudah bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi ke dunia politik Pakistan, karena diskriminasi perempuan yang masih kerap terjadi di sana. Sebagai perempuan pertama yang terjun ke perpolitikan Pakistan, sangat penting jika melihat kembali hal-hal yang melatar belakanginya untuk ikut serta ke dalam politik. Bakat politik Benazir Bhutto sebelum ayahnya digulingkan oleh Zia Ul-Haq belum terlalu tampak akan tetapi setelah ayahnya digantung pada

tahun 1979, yang membuatnya bangkit dan berjuang dalam politik untuk mengembalikan martabat keluarganya (Munif, 2007, p. 23).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, telah dijelaskan bahwa Pakistan adalah negara yang memiliki politik yang belum stabil, seringkali terjadi pembunuhan politik, partisipasi perempuan yang masih kurang karena masyarakat Pakistan masih menganut nilai patriarki, serta kemunculan Benazir Bhutto ke dalam politik Pakistan yang sangat keras. Maka dari penjelasan latar belakang di atas dapat ditarik pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

*Bagaimana upaya Benazir Bhutto dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik Pakistan pada tahun 1988-1990?*

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat perkembangan partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan.
2. Untuk mengetahui latar belakang Benazir Bhutto dalam partisipasinya ke dalam politik Pakistan pada tahun 1988 hingga 1990.

## **1.4. Signifikansi**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat perkembangan partisipasi perempuan dalam politik Pakistan. Sebab, Pakistan adalah negara yang memiliki partisipasi perempuan yang sangat rendah. Namun di tengah minimnya partisipasi perempuan ke dalam politik di Pakistan, Benazir Bhutto muncul sebagai perempuan pertama yang terjun ke dalam perpolitikan Pakistan. Maka dari itu, penulis juga ingin melihat apa yang melatarbelakangi Benazir Bhutto untuk ikut

serta ke dalam perpolitikan keras di Pakistan. Penelitian ini dianggap penting karena melihat Pakistan adalah negara yang masih menganut nilai-nilai patriarki yang mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, Benazir Bhutto berhasil melunturkan nilai-nilai patriarki di Pakistan. Penulis akan mencoba menganalisa penelitian ini dengan menggunakan teori *Women Empowerment*, yang mana akan melihat upaya yang dilakukan Benazir untuk mengubah struktur-struktur yang ada di masa pemerintahan sebelum era Benazir Bhutto. Penelitian dalam melihat upaya Benazir dalam meningkatkan partisipasi perempuan ini belum banyak yang meneliti secara spesifik pada periode pertama. Benazir Bhutto menjadi Perdana Menteri yaitu pada tahun 1988 hingga tahun 1990. Hal ini yang menyebabkan penulis lebih fokus pada periode ini, sebab pada periode pertama Benazir Bhutto berhasil menjadi Perdana Menteri di tengah-tengah kondisi Pakistan yang masih menganut nilai patriarki. Nilai patriarki yang dianut di Pakistan ini ialah masih menjunjung tinggi kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dibandingkan posisi perempuan yang cenderung tidak terlalu diperhatikan hak-haknya. Dengan adanya penelitian ini akan menunjukkan bahwa dengan nilai patriarki yang ada di Pakistan tidak membuat Benazir Bhutto mengurungkan niatnya menjadi perdana menteri. Sehingga dengan kehadirannya dapat menunjukkan bahwa beberapa masyarakat Pakistan masih bisa membuka pemikirannya terhadap keberadaan perempuan dalam partisipasinya ke dalam dunia politik Pakistan.

## **1.5. Cakupan Penelitian**

Penelitian ini akan fokus membahas mulai dari tahun 1988 hingga tahun 1990, yang mana pada periode tersebut ialah periode pertama Benazir Bhutto menjadi politikus di Pakistan. Alasan penulis memilih periode pertama ialah karena pada periode tersebut Benazir Bhutto banyak menemukan tantangan pada saat sebelum menjabat sebagai politikus hingga ia terpilih dan melihat partisipasi perempuan dalam politik pasca Benazir Bhutto menjabat. Penelitian ini akan menganalisa tantangan Benazir Bhutto yang menjadi politikus pertama perempuan yang bisa terpilih menjadi perdana menteri di tengah kondisi Pakistan yang masih menganut nilai-nilai patriarki. Benazir Bhutto dengan semangat yang tangguh mampu meyakinkan rakyat Pakistan bahwa ia bisa memimpin di Pakistan dan akan membawa perubahan di negaranya. Sebelum Benazir Bhutto hadir sebagai politikus perempuan pertama, Pakistan dikenal sebagai negara yang sangat membatasi aktivitas perempuan. Sehingga kajian ini dianggap penting karena melihat Pakistan yang keras terhadap perempuan bisa memperbolehkan Benazir Bhutto yang dalam hal ini menjadi politikus pertama perempuan dan berhasil menjadi perdana menteri. Di akhir periode ini juga, Benazir Bhutto sempat diasingkan oleh presiden yang pada saat menjabat, ialah Zia Ul-Haq. Dalam sejarah keluarga Bhutto, Zia Ul-Haq memang sudah tidak asing lagi, dimulai pada saat Zulfikar Ali Bhutto yang divonis hukuman gantung pada era Zia Ul-Haq lalu ia juga berhasil menyingkirkan Benazir Bhutto dari kursi perdana menteri dan harus diasingkan ke Paris selama 7 tahun.

## 1.6. Kajian Pustaka

Dengan melihat latar belakang keluarga Benazir Bhutto yang menggeluti dunia politik, Mary meneliti bahwa hal tersebut menjadikan motivasi Benazir untuk menjadi politikus, yang mana buku tersebut berjudul "*Benazir Bhutto: Pakistani Prime Minister and Activist*" (Englar, 2006). Buku ini menjelaskan bahwa pada saat itu rakyat Pakistan banyak yang hidup dalam kemiskinan dan bahkan tidak bisa bersekolah. Larangan perempuan saat itu tidak diperbolehkan sekolah. Namun melihat hal itulah yang menjadikan Benazir Bhutto perempuan yang berani dan kuat dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya dan juga memperjuangkan perempuan agar bisa melakukan aktivitas seperti layaknya laki-laki. Sebelum terpilih menjadi Perdana Menteri, Benazir Bhutto banyak mempengaruhi perempuan-perempuan Pakistan untuk mulai berani menyuarakan hak-haknya. Dan setelah terpilih, beberapa perempuan mulai berani untuk ikut serta dalam politik dan ikut membantu Benazir Bhutto untuk menyuarakan hak-hak perempuan yang ada di Pakistan. Buku ini banyak menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi Benazir Bhutto untuk menjadi politikus di negara yang tidak ramah perempuan. Karena kejadian seperti ini dikatakan sangat jarang ditemukan di negara yang masih menganut nilai patriarki. Akan tetapi buku ini hanya fokus membahas latar belakang dan tidak banyak membahas pergerakan politik Benazir Bhutto pada periode pertama.

Tulisan Hussain yang berjudul "*The Assassination of Benazir Bhutto*" (Hussain, 2008, p. 27), dapat melengkapi tulisan Mary yang dalam buku ini menjelaskan tentang perjalanan politik Benazir Bhutto dari awal hingga pada tahun 2007. Buku ini menceritakan sejarah perpolitikan keluarga Bhutto, dimulai



dari pada masa jabatan ayahnya hingga pada saat Benazir Bhutto menjabat. Namun perjalanan politik yang dijalani Benazir Bhutto mendapatkan banyak rintangan, baik itu dari lawan politiknya maupun dari rakyat Pakistan yang bukan berasal dari pendukungnya. Namun karena Benazir selalu dalam bayang-bayang pembunuhan ayahnya, yang membuat Benazir tumbuh menjadi politikus yang berani. Masa-masa jabatan Benazir yang tidak berjalan mulus karena ia banyak dituduh atas tindakan korupsi, sehingga ia harus menerima masa tahanan kepada dirinya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Benazir Bhutto untuk tetap menjadi politikus demi mengembalikan martabat keluarganya. Akan tetapi di dalam buku yang ditulis oleh Yassir ini hanya menjelaskan sebagian besar sejarah politik Benazir Bhutto hingga pada saat ia terbunuh. Yassir juga banyak menambahkan pandangan-pandangan presiden dari belahan dunia terhadap pembunuhan Benazir Bhutto. Kebijakan-kebijakan dan partisipasi perempuan dalam politik Pakistan masih kurang terlihat dalam buku ini.

Pemikiran yang sama dengan penulis sebelumnya, di dalam buku yang ditulis oleh Zaenal Ali yang berjudul "*Tragedi Benazir Bhutto*" (Ali, 2008, p. 60). Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana perjalanan karir Benazir Bhutto sebagai politikus di Pakistan. Meskipun mendapatkan banyak dukungan akan tetapi ia juga banyak mendapatkan pertantangan dari beberapa kalangan. Selama masa jabatannya Benazir mencoba mengurangi angka kemiskinan yang sudah meluas di Pakistan akan tetapi hal tersebut sangat sulit diwujudkan. Namun diantara beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Benazir Bhutto yang diantaranya adalah kesetaraan gender, kesehatan dan mengurangi angka diskriminasi terhadap perempuan, kebijakan dalam kesetaraan genderlah yang

terlihat banyak memberikan perubahan. Perempuan-perempuan di Pakistan sudah mulai bisa melakukan aktivitas yang sama dengan laki-laki, serta bisa menyuarkan hak-haknya yang selama ini tidak pernah terdengarkan. Buku ini sudah menjelaskan mengenai pergerakan politik Benazir Bhutto dalam hal partisipasi politik perempuan di Pakistan, akan tetapi isi dari buku ini belum terlalu spesifik sehingga pembahasannya masih meluas.

Ketertarikan Heraldo Munoz dalam melihat keberanian Benazir Bhutto yang dapat berpartisipasi di perpolitikan Pakistan, yang kemudian ia jadikan sebagai penelitiannya yang berjudul “*Getting Away with Murder: Benazir Bhutto’s Assassination and the Politics of Pakistan* (Munoz, 2014, pp. 18-19). Buku ini menjelaskan mengenai perjalanan politik Benazir Bhutto yang penuh dengan perjuangan. Keberanian Benazir Bhutto untuk masuk ke dunia politik disebabkan karena ia menyaksikan sendiri ketika bapaknya, Zulfikar Ali Bhutto yang dihukum gantung pada saat pemerintahan Zia Ul-Haq. Melihat kejadian tersebut mengubah Benazir Bhutto menjadi sosok yang berani dalam mengeluarkan pendapat-pendapatnya di depan umum. Dengan kegigihannya itu membuat Benazir Bhutto dinobatkan sebagai tokoh yang paling penting dan pemimpin yang sangat dihormati dalam perpolitikan Pakistan. Selain itu, ia juga banyak memperjuangkan hak-hak perempuan yang mana hal ini menjadi keberhasilannya karena perempuan-perempuan Pakistan mengalami kemajuan dan mereka bisa menyuarkan hak-haknya di parlemen.

Sependapat dengan Heraldo Munoz, hal ini juga disampaikan oleh Rafiq Zakaria dalam bukunya yang berjudul “*The Trial of Benazir*” (Zakaria, 1989). Buku ini menjelaskan tentang Benazir Bhutto yang terus menerus memperlihatkan keberaniannya dalam dunia politik. Bukan hanya itu, Benazir Bhutto juga dianggap lebih berani dalam memberikan kritik terhadap pemimpin yang tidak menjalankan kewajibannya untuk kesejahteraan rakyat Pakistan. Hal ini juga mempengaruhi perempuan-perempuan Pakistan yang berada dalam dunia politik Pakistan untuk berani mengungkapkan apa yang berhak mereka ungkapkan dan juga meberikan warna baru dalam dunia politik di Pakistan agar dapat menempatkan perempuan setingkat dengan laki-laki. Buku-buku di atas sudah banyak menjelaskan latar belakang Benazir Bhutto dalam dunia politik di Pakistan akan tetapi belum menjelaskan secara spesifik pada tahun 1988 hingga 1990. Posisi penulis akan fokus pada periode tersebut, yang mana pada tahun itu merupakan periode pertama Benazir Bhutto sebagai politikus di Pakistan dan juga saat itu Benazir Bhutto mendapatkan banyak tantangan politik dari lawan politiknya terdahulu.

Hampir selaras dengan buku yang ditulis oleh Heraldo Munoz yang berbicara tentang masa pemerintahan Zia Ul-Haq, Shireen Burki dalam bukunya yang berjudul “*The Politics of State Intervention: Gender Politics in Pakistan, Afganistan and Iran*” (Burki, 2013, pp. 67-68). Buku ini mengemukakan bahwa pada pemilihan tahun 1988, masyarakat Pakistan terutama kaum perempuan berharap besar akan terpilihnya Benazir Bhutto ke dalam kursi pemerintahan. Benazir Bhutto mengeluarkan kebijakan yang salah satunya tentang kesetaraan gender di Pakistan, agar perempuan bisa melakukan aktivitas yang sama seperti

yang dilakukan laki-laki. Akan tetapi, dibawah sistem pemerintahan Zia Ul-Haq perempuan bahkan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang sama dengan laki-laki dan larangan tersebut juga berdampak terhadap posisi Benazir Bhutto yang saat itu menjabat menjadi perdana menteri. Zia Ul-Haq yang ingin menjadikan Pakistan sebagai negara Islam dan menganut norma-norma Islam, namun beberapa masyarakat tidak dapat mendukung kebijakan Zia Ul-Haq yang sebagian dari mereka ialah perempuan. Buku ini banyak menjelaskan mengenai kebijakan yang dikeluarkan Zia Ul-Haq dan dampaknya terhadap perempuan di Pakistan. Namun, buku ini tidak banyak menjelaskan mengenai partisipasi perempuan di Pakistan, setelah masa kepemimpinan Benazir Bhutto di periode pertamanya.

Pada tahun 1990 ialah tahun akhir dari periode pertama masa pemerintahan Benazir Bhutto. Di tahun tersebut, Benazir diturunkan dari kursi Perdana Menteri oleh Presiden yang menjabat pada masa itu ialah Ishaq Khan. Alhasil, Benazir Bhutto tidak dapat melanjutkan kedudukannya sebagai perdana menteri dan kebijakan-kebijakannya untuk memperjuangkan hak perempuan berhenti pada saat itu. Namun keputusan yang dikeluarkan oleh Ishaq Khan ternyata dianggap kurang tepat, karena masyarakat Pakistan menilai bahwa pengganti Benazir Bhutto sebagai perdana menteri yaitu Nawaz Sharif dianggap belum siap dengan kedudukannya tersebut. Pada masa kedudukan Nawaz sebagai perdana menteri, tidak banyak mengurangi kekerasan yang terjadi di Pakistan dan juga tidak memperjuangkan hak-hak perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh Benazir Bhutto. Hal tersebut diungkapkan oleh Mehtab Ali Shah dalam bukunya yang berjudul *“The Foreign Policy of Pakistan: Ethnic Impacts on*

*Diplomacy 1971-1994*” (Shah, 1997, pp. 59-60). Buku ini menjelaskan mengenai tantangan demi tantangan yang dirasakan oleh Benazir Bhutto hingga pada tahun akhir di periode pertamanya. Buku ini telah melengkapi tulisan sebelumnya yang berbicara mengenai masa jabatan Benazir Bhutto pada awal tahun di periode pertamanya. Namun buku ini tidak membahas mengenai partisipasi perempuan setelah itu, yang mana hal ini yang akan menjadi bahan penelitian penulis.

Tulisan lain dari Ni'matul Husna yang berjudul “*Hak Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto*” (Husna, 2010) yang mana tulisan ini menjelaskan mengenai hak politik perempuan dalam Islam menurut sudut pandang Benazir Bhutto faktor-faktor yang melatarbelakangi dan pengaruh pemikirannya terhadap rakyat Pakistan. Tulisan ini mengutip dari Al-Qur'an yang berbunyi: “*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan*”. Melihat dari kutipan ini beberapa ada yang menentang dan ada juga yang mendukung, sebab kutipan tersebut selalu diidentikan dengan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Islamisasi yang dianut Pakistan yang banyak menimbulkan ketidaksetaraan gender. Perjuangan Benazir Bhutto untuk mewujudkan negara yang menganut demokrasi agar kesetaraan gender di Pakistan bisa diatasi dan perempuan bisa mendapatkan hak-haknya sama dengan laki-laki. Perbedaan antara tulisan ini dengan posisi penulis ialah tulisan ini banyak menjelaskan hak-hak politik perempuan di Pakistan menurut pandangan Benazir Bhutto dan juga menganalisis berdasarkan Al-Qur'an. Sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap partisipasi perempuan pada politik Pakistan dan melihat pergerakan politik Benazir Bhutto pada periode pertama. Sedangkan di tulisan ini menjelaskan secara garis besarnya saja.

Buku ini yang ditulis sendiri oleh Benazir Bhutto yang berjudul *“Reconciliation: Islam, Democracy and the West”* (Bhutto, *Reconciliation: Islam, Democracy and the West*, 2008) menjelaskan bahwa beberapa orang mengatakan bahwa demokrasi tidak bisa berkembang di negara yang Islam karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam sebuah teori yang mengatakan Islam yang berakarkan otoritas dan juga memperkenalkan kediktatoran. Namun Benazir menolak akan pemikiran tersebut, karena sebagai Muslim yang hidup dalam lingkup demokrasi dan diktator merasa bahwa hal tersebut bisa berjalan secara beriringan. Dengan latar belakang pendidikan yang didapatkannya dari barat, Benazir mencoba memberikan warna baru terhadap Pakistan yaitu memberikan nilai-nilai barat di sistem pemerintahannya. Benazir mengharapkan negara Pakistan bisa menyatukan antara pemikiran yang Islami, demokrasi dan menganut unsur-unsur barat. Benazir yang sering memperjuangkan hak-hak perempuan selain agar perempuan bisa menyuarakan hak-haknya dan juga agar terwujudnya sistem demokrasi di Pakistan. Namun pemikirannya tersebut banyak yang menentang sebab, Pakistan yang masih kuat akan unsur-unsur Islam tidak bisa menggabungkan ketiganya. Buku ini ialah buku yang ditulis sendiri oleh Benazir Bhutto yang isinya menggambarkan kondisi pemerintahan di Pakistan. Penulis akan menjadikan buku ini sebagai referensi ke dalam skripsi ini.

Hampir sama dengan beberapa penelitian sebelumnya, buku yang ditulis oleh Corinne J. Naden yang berjudul *“Leading Women: Benazir Bhutto”* (Naden, 2011, p. 51), mencoba melihat perjalanan Benazir Bhutto dalam dunia politik dan melihat bagaimana Benazir menghadapi lawan-lawan politiknya yang berusaha untuk menurunkannya Benazir Bhutto dari kursi pemerintahan. Namun walaupun

demikian, Benazir sangat berusaha untuk tetap bisa berada dalam politik Pakistan karena masih banyak yang perlu ia benahi dalam perpolitikan di Pakistan termasuk diantaranya partisipasi perempuan. Benazir sering mengatakan bahwa demokrasi di negaranya sudah tidak terlihat lagi karena masyarakatnya tidak diberi kebebasan untuk berbicara. Bukan hanya itu, Benazir beberapa kali menyinggung masa pemerintahan Zia yang tidak memberikan kebebasan terhadap perempuan yang hal itu dianggapnya sangat melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan tulisan-tulisan yang berasal dari beberapa penulis di atas sama-sama menjelaskan mengenai masa kepemimpinan Benazir Bhutto. Akan tetapi tidak spesifik menjelaskan mengenai masa kepemimpinan Benazir Bhutto pada periode pertama yaitu pada tahun 1988 hingga tahun 1990. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian ini yang akan lebih fokus membahas masa kepemimpinan Benazir Bhutto pada periode pertama di tahun 1988 hingga tahun 1990. Penulis akan fokus pada periode pertama sebab di periode pertama Benazir Bhutto berhasil menjadi Perdana Menteri di Pakistan yang mana Pakistan masih dikenal sebagai Negara yang menganut nilai patriarki.

## **1.7. Landasan konseptual**

### **1.7.1. *Women Empowerment Concept***

Landasan yang akan digunakan pada skripsi ini ialah *Women Empowerment concept*. Dalam pemahaman konsep ini, penulis akan fokus terhadap tulisan dari Jo Rowlands yang berjudul "*Questioning Empowerment: Working with Women Honduras*". Dalam tulisan ini Rowlands menjelaskan pandangannya mengenai bagaimana proses di suatu negara dalam pembentukan women empowerment ini.

Rowlands melihat bahwa konsep *empowerment women* ini adalah suatu proses untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan ruang yang lebih besar kepada perempuan untuk berpartisipasi. *Women empowerment* dalam konteks ini adalah perempuan harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam struktur politik dan ekonomi dalam masyarakat. Perempuan diberi kesempatan untuk menduduki kursi kekuasaan, terlibat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Sehingga hal itu akan melahirkan keputusan baru untuk memberi kekuatan terhadap individu atau kelompok-kelompok yang ingin menciptakan perubahan, memberi peluang bagi perempuan untuk berperan dalam struktur politik, ekonomi dan proses pembuatan kebijakan.

Menurut Rawlands, dalam proses empowerment kekuatan atau “power” menjadi indikator penting. Rawlands mengkategorikan “power” tersebut menjadi 4 bentuk, yaitu :

1. *Power over*: mengendalikan kekuasaan, yang mana membawa orang-orang yang tidak terlibat dalam pembuatan keputusan dapat ikut terlibat di dalamnya.
2. *Power to*: Kekuasaan produktif yang mampu menciptakan tindakan atau kemungkinan baru tanpa adanya dominasi. *Power to* ini bertujuan untuk mencapai kepentingan kelompok.
3. *Power with*: Kekuatan yang berasal dari rasa kepemilikan yang lebih besar dalam kelompok dibandingkan dengan jumlah individu yang ada. Memiliki kekuatan, khususnya ketika menghadapi sebuah permasalahan.



4. *Power from within*: Kekuatan itu dibangun dengan adanya kekuatan spiritual yang akan berdampak kepada keikhlasan dan saling menghormati baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.

Kekuatan-kekuatan ini memberikan ruang lingkup untuk berbagi dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki, sehingga mampu melihat dan merasa memiliki kapasitas untuk bertindak dan memengaruhi dalam pembuatan keputusan. Di sini, kekuatan muncul bukan dari keterlibatan secara dominan, akan tetapi menstimulasi aktivitas individu atau kelompok dengan meningkatkan moral mereka. Dalam *empowerment* tidak seharusnya melakukan konstruksi negatif terhadap sosial, oleh sebab itu orang-orang akan melihat diri mereka sendiri dalam memiliki kapasitas dan hak untuk bereaksi serta memberikan pengaruh dalam membuat kebijakan. Untuk menjalankan *empowerment* itu sendiri, Rawlands mengelompokkan prosesnya menjadi 3 dimensi yaitu:

1. *Personal*: mengembangkan rasa percaya diri dan meningkatkan kapasitas diri.
2. *Rational*: Mengembangkan kemampuan dalam bernegosiasi dan memberikan pengaruh terhadap hubungan satu sama lain serta dalam membuat keputusan.
3. *Collective*: Terlibat dalam struktur politik yang mencakup tindakan kolektif yang berbasis kerjasama daripada kompetisi.

Proses dalam *empowerment* ini akan melihat pengalaman atau sejarah yang berasal dari individu atau kelompok. Sehingga berdasarkan pengalaman